



Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari



REVISI RENCANA KERJA TAHUN 2023 BPHL WILAYAH IV JAMBI

KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi tahun anggaran 2023 disusun sebagai pedoman, arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja satuan kerja/organisasi lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi dan sekaligus sebagai alat pengendali kegiatan. Sehubungan dengan telah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-029.03.2.426882/2023, maka BPHL Wilayah IV Jambi sebagai satker dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Revisi Rencana Kerja Tahun 2023 dengan berpedoman pada Revisi Rencana Strategis BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2020-2024 dan Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2023 .

Revisi Rencana Kerja ini memuat kegiatan-kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi BPHL Wilayah IV Jambi yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Revisi Rencana Kerja ini diucapkan terima kasih.



Jambi, 18 Desember 2023
Kepala Balai,

Wahyu Nuhidayat, S.Hut, M.Sc
NIP.19700901 200003 1 004

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Bagan	4
Daftar Tabel	5
I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	9
C. Struktur Organisasi dan SDM	10
D. Sarana dan Prasarana	14
E. Gambaran Umum Wilayah Kerja	15
II. CAPAIAN KINERJA 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022	21
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	21
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	33
III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	36
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional	36
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023	37
IV. PENUTUP	51
V. Lampiran	54
Lampiran 1. MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 YANG MEMUAT INDIKATOR KEGIATAN, UNIT KEGIATAN, SASARAN UNIT KEGIATAN, ELEMEN KEGIATAN, TARGET, LOKASI	54
Lampiran 2. REVISI PERJANJIAN KINERJA BPHL WILAYAH IV JAMBI TAHUN 2023	60

DAFTAR BAGAN

Hal

Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi BPHL Wil. IV Jambi	11
Bagan 2. Kawasan Hutan di Provinsi Jambi	16

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Jabatan	12
Tabel 2. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Pangkat/ Golongan Ruang	12
Tabel 3. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir	13
Tabel 4. Pejabat Fungsional pada BPHL Wilayah IV Jambi	14
Tabel 5. Uraian Sarana dan Prasarana Pada BPHL Wilayah IV Jambi	14
Tabel 6. Daftar Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Jambi	16
Tabel 7. Daftar PBPH-eksisting di Provinsi Jambi	18
Tabel 8. GANISPH (Non ASN) di Provinsi Jambi	20
Tabel 9. GANISPH (ASN) di Provinsi Jambi	20
Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 11. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 12. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021	33
Tabel 13. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021	34
Tabel 14. Rencana Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 per kegiatan	53

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan kehutanan saat ini lebih diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Hutan yang memiliki manfaat ekologi, sosial dan ekonomi merupakan modal pembangunan nasional karena manfaatnya tersebut nyata bagi masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pemanfaatan hutan secara lestari dan berkesinambungan menjadi kewajiban untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara berkeadilan, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk yang akan datang.

Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, pariwisata dan lain-lain) secara berkelanjutan. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pemanfaatan hutan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat tersebut memberi kelonggaran bagi usaha pemanfaatan kawasan hutan, bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Bahkan, kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru pun masih bisa dimanfaatkan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan hutan lindung juga dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang terdapat di dalamnya, harus dilaksanakan secara tepat, cermat dan terencana. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antar *stakeholders* yang terlibat langsung di dalamnya. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi sebagai salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus dapat ikut serta berperan aktif untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dikemukakan di atas.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yaitu **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**. Sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari antara lain :

1. Menurunnya laju penyusutan hutan.
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.
6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Sasaran strategis sekaligus Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ini adalah :

1. Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan Kawasan Hutan seluas 453.000 Ha.
2. Jumlah produksi kayu bulat 60 juta m3.
3. Meningkatnya nilai ekspor produk hasil hutan 10,5 Miliar USD
4. Meningkatnya PNBP dari pemanfaatan hutan 3,30 Triliun Rupiah
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan berbasis masyarakat 15.000 Ha.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK (SAKIP 83 poin).

Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah IV Jambi adalah mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yaitu:

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Lestari,
2. Peningkatan Usaha Hutan Lestari,
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan,
4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan,
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan.
6. Dukungan Manajemen

Agar semua kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, mencapai tujuan dan sasaran serta memenuhi indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan (tahun 2023) dengan optimal, efektif dan efisien, maka diperlukan suatu rencana kerja yang tersusun dalam **Revisi Rencana Kerja (RENJA) BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2023**.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jambi, yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim No.10a, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana yang telah diamanahkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, terdapat perubahan nomenklatur yang sebelumnya Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) menjadi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) serta terdapat perubahan tugas pokok dan fungsi. BPHL Wilayah IV Jambi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan tugasnya BPHL Wilayah IV Jambi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- b. fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- d. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

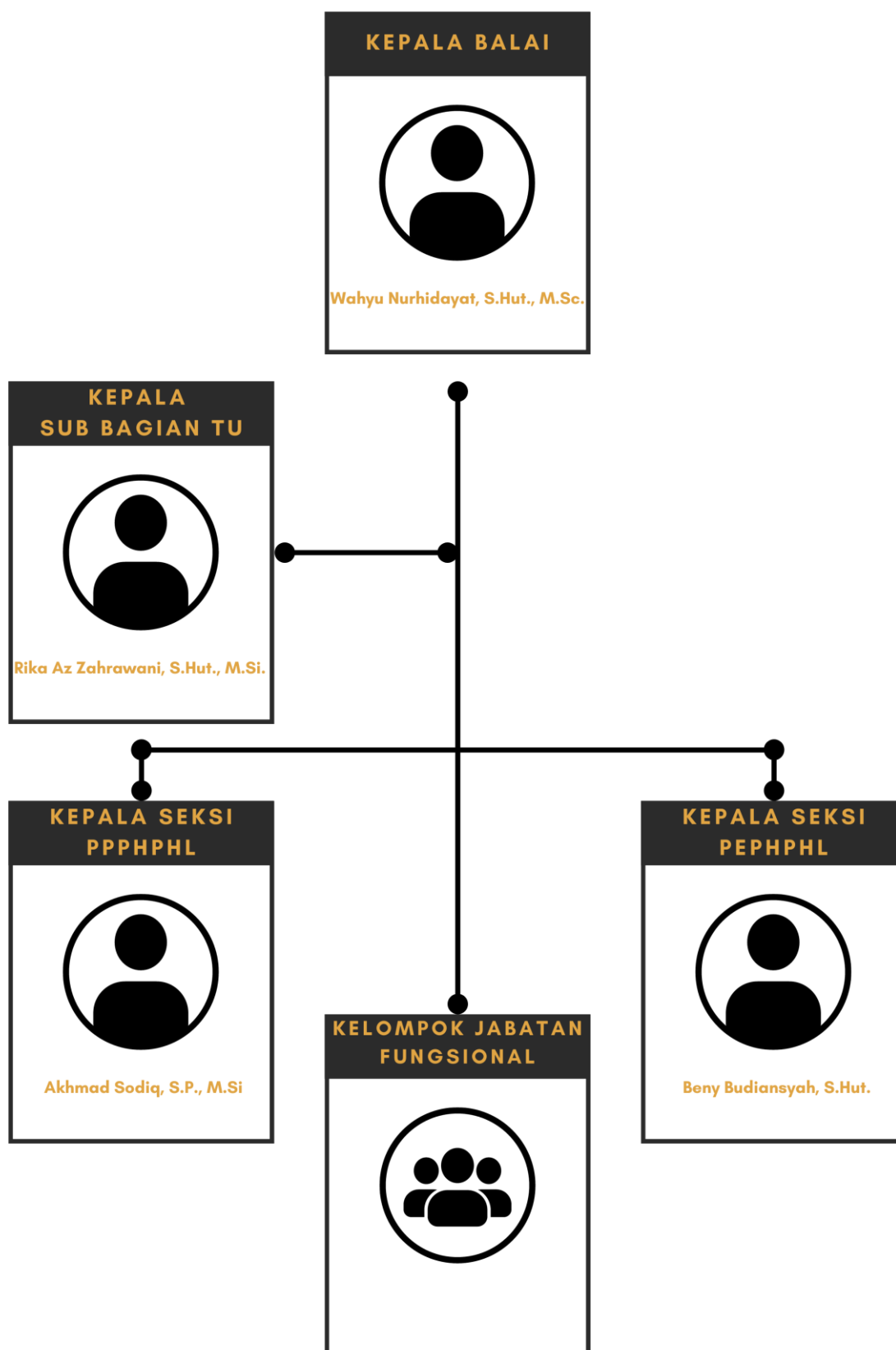
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Penyusunan Revisi Rencana Kerja BPHL Wilayah IV Jambi bermaksud untuk memberikan arahan dan pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh pegawai, untuk dapat dilaksanakan dengan baik, optimal, terkoordinasi, terjadwal dan terukur, sehingga dapat dilakukan evaluasi kemajuan target secara periodik dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Hal menjalankan tugas pokok dan fungsi BPHL Wilayah IV Jambi memiliki struktur organisasi BPHL sebagaimana Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1. Struktur Organisasi BPHL Wilayah IV Jambi



Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi per Desember 2022 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang terdiri 37 (tiga puluh tujuh) orang PNS, 4 (empat) orang CPNS dan 11 (sebelas) orang PPNPN. Keadaan pegawai BPHL Wilayah IV Jambi menurut jabatan, pangkat/golongan ruang dan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 1, 2 dan 3.

Tabel 1. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Kepala Balai	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	1	1
3.	Kasi Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	-	1
4.	Kasi Pemantauan, Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	-	1
5.	Kelompok Fungsional	10	10	20
6.	Non Struktural	14	3	17
7.	PPNPN	8	3	11
Total		35	17	52

Sumber: data SIMPEG 2022

Tabel 2. Keadaan PNS BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	Pembina Utama, IV/e	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda, IV/c	-	-	-
4.	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
5.	Pembina, IV/a	2	3	5
6.	Penata Tk. I, III/d	10	4	14
7.	Penata, III/c	2	1	3
8.	Penata Muda Tk. I, III/b	3	4	7
9.	Penata Muda, III/a	2	1	3
10.	Pengatur Tk. I, II/d	3	-	3
11.	Pengatur, II/c	2	1	3
12.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-	-	-
13.	Pengatur Muda, II/a	2	-	2

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
14.	Juru Tk. I, I/d	-	-	-
15.	Juru, I/c	-	-	-
16.	Juru Muda Tk. I, I/b	-	-	-
17.	Juru Muda, I/a	-	-	-
Total		27	14	41

Sumber: SIMPEG KLHK 2022 diolah

Tabel 3. Keadaan Pegawai BPHL Wilayah IV Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP/Sederajat	1	-	1
3.	SLTA/Sederajat			
	a. SKMA/Sekolah Kehutanan sederajat	3	-	3
	b. SLTA/Sederajat lainnya	11	1	12
4.	D1	-	-	-
5.	D2	-	-	-
6.	D3	3	1	4
7.	S1/D4			
	a. Kehutanan	3	7	10
	b. Non Kehutanan	6	6	12
8.	Pasca Sarjana (S2)	8	2	10
9.	Doktor (S3)	-	-	-
Total		35	17	52

Sumber: SIMPEG KLHK 2022 diolah

Selain pegawai yang menduduki jabatan struktural dan non struktural, pada BPHL Wilayah IV Jambi terdapat 20 (dua puluh) pegawai jabatan fungsional, yang terdiri atas jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di bawah binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jabatan fungsional Keuangan APBN di bawah binaan Kementerian Keuangan dan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di bawah binaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Rincian lebih lengkap jabatan fungsional BPHL Wilayah IV Jambi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pejabat Fungsional pada BPHL Wilayah IV Jambi

No	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		L	P	
A. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				
1.	PEH Madya	1	1	2
2.	PEH Muda	4	4	8
3.	PEH Pertama	1	3	4
5.	PEH Penyelia	-	-	-
6.	PEH Mahir	-	-	-
7.	PEH Terampil	1	1	2
8.	PEH Pemula	2	-	2
B. Keuangan APBN				
1.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	-	1	1
2.	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	-	-
C. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				
1.	Pengelolaan Pengadaan B/J Pertama	1	-	1
Jumlah		10	10	20

Sumber: SIMPEG KLHK 2022 diolah

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pada BPHL Wilayah IV Jambi secara umum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas rutin, namun untuk mendukung pelaksanaan teknis masih kurang terutama pada alat pendukung pengembangan sistem informasi, perpetaan dan alat laboratorium pengujian hasil hutan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPHL Wilayah IV Jambi telah tertuang dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) Tahun 2022 yang diolah dan dihasilkan melalui aplikasi SIMAK-BMN. Uraian sarana dan prasarana pada BPHL Wilayah IV Jambi per kelompok barang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Uraian Sarana dan Prasarana Pada BPHL Wilayah IV Jambi

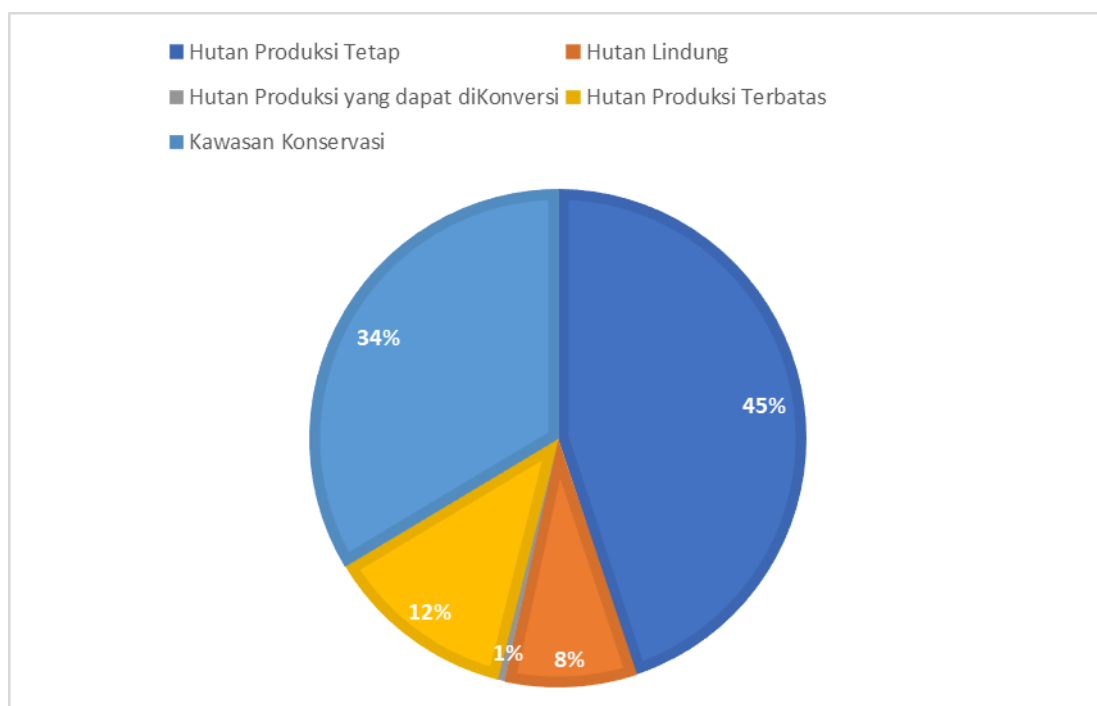
No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
A. Tanah				
1.	Tanah Persil	M2	10.332	Baik

No	Uraian Kelompok Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
B. Peralatan dan Mesin				
1.	Alat Bantu	Unit	1	Baik
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	11	Baik
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Buah	44	Baik
4.	Alat Ukur	Buah	6	Baik
5.	Alat Pengolahan	Buah	2	Baik
6.	Alat Kantor	Buah	59	Baik
7.	Alat Rumah Tangga	Buah	300	Baik
8.	Alat Studio	Buah	40	Baik
9.	Alat Komunikasi	Buah	14	Baik
10.	Alat Kedokteran	Buah	1	Baik
10.	Unit Alat Laboratorium	Buah	87	Baik
11.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Buah	4	Baik
12.	Alat Khusus Kepolisian	Buah	11	Baik
13.	Komputer Unit	Buah	70	Baik
14.	Peralatan Komputer	Buah	40	Baik
B. Gedung dan Bangunan				
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	6	Baik
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Unit	5	Baik
3.	Tugu/Tanda Batas	Unit	2	Baik
C. Jaringan				
1.	Instalasi Air Bersih	Unit	1	Baik
2.	Jaringan Listrik	Unit	1	Baik

E. GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

Wilayah kerja BPHL Wilayah IV Jambi adalah seluruh Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi dengan luas 2,1 Juta Hektar secara administrasi terletak pada 9 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6613/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Jambi terdiri dari Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 714.088 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 180.792 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 954.012 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 264.398 Ha, Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) seluas 11.062 Ha. Presentase Kawasan Hutan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Bagan 2 berikut.

Bagan 2. Kawasan Hutan di Provinsi Jambi



Dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut terbagi habis secara pengelolaan hutan oleh 17 unit KPH (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.77/Menhut-II/2010). Daftar KPH yang berada di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Provinsi Jambi

No	Nama KPH	Luas (Ha)	Pengesahan RPHJP
1.	KPHP Unit I Kerinci	34,250.00	SK.1983/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017 tanggal 10 April 2017
2.	KPHP Unit II Bungo	49,760.00	SK.8658/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
3.	KPHP Unit III Bungo	69,615.00	SK.10485/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 27 Desember 2019
4.	KPHP Unit IV Merangin	51,026.00	SK.4764/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020
5.	KPHP Unit V Merangin	53,412.00	SK.4779/MENLHKKPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020 tanggal 12 Agustus 2020
6.	KPHP Unit VI Merangin	65,160.00	SK.321/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/2/2018 tanggal 7 Februari 2018
7.	KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	121,102.00	SK.198/Menhut-II/Reg.1/2014 tanggal 29 Januari 2014 (Review)
8.	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	109,765.00	SK.1450/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018 tanggal 3 April 2018

No	Nama KPH	Luas (Ha)	Pengesahan RPHJP
9.	KPHP Unit IX Tebo Barat	148,685.00	SK.2419/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2018 tanggal 25 April 2018
10.	KPHP Unit X Tebo Timur	106,456.00	SK.4748/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/7/2018 tanggal 13 Juli 2018
10.	KPHP Unit XI Batanghari	107,671.00	Belum Pengesahan RPHJP
11.	KPHP Unit XII Batanghari	80,509.00	Belum Pengesahan RPHJP
12.	KPHP Unit XIII Muaro Jambi	103,271.00	SK.8567/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018
13.	KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur	77,402.00	SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 27 Desember 2019
14.	KPHP Unit XV Tanjung Jabung Barat	91,091.00	Belum Pengesahan RPHJP
15.	KPHP Unit XVI Tanjung Jabung Barat	123,588.65	SK.10482/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 27 Desember 2019
16.	KPHL Unit XVII Tanjung Jabung Barat	15,965.00	SK.5429/MENLHK/KPHLPKHPL/DAS3/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017
17.	KPHP Unit I Kerinci	34,250.00	SK.1983/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017 tanggal 10 April 2017
Jumlah (Ha)		1,408,728.65	

Areal Hutan Produksi di Provinsi Jambi tersebut telah diberikan izin pengelolaan hutan berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman sebanyak 18 unit manajemen dengan total luas 662.700 Ha, PBPH Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam sebanyak 2 (dua) unit dengan luas 56.045 Ha, 2 (dua) Unit PBPH Restorasi Ekosistem seluas 86.417 Ha. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jambi terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan sehingga dalam praktik kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan

kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) eksisting di Provinsi Jambi berjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) Izin yang terdiri dari 2 (dua) PBPH eksisting Hutan Alam, 2 (dua) PBPH eksisting Restorasi Ekosistem dan 18 (delapan belas) PBPH eksisting Hutan Tanaman. Daftar PBPH Hutan Alam dan PBPH Restorasi Ekosistem dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel. 7. Daftar PBPH-eksisting di Provinsi Jambi

NO	NAMA PBPH	NOMOR SK	LOKASI	LUAS (HA)
A.	PBPH Hutan Alam (PBPH-HA)			
1.	PT. Putra Duta Indah	SK.90/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022	Muaro Jambi	34.730
2.	PT. Pesona Belantara	SK.91/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022	Muaro Jambi	21.315
	Jumlah Luas (Ha) PBPH-HA			56.045
B.	PBPH Restorasi Ekosistem (PBPH-RE)			
1.	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	SK.565/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022	Batanghari Sarolangun	47.752
2.	PT. Alam Bukit Tiga Puluh	SK.1195/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	38.665
	Jumlah Luas (Ha) PBPH-RE			86.417
C.	PBPH Hutan Tanaman (PBPH-HT)			
1.	PT. Wira Karya Sakti	SK.1141/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Muaro Jambi, Batanghari, Tanjabtim, Tanjabbar	287.166
2.	PT. Tebo Multi Agro	SK.1119/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	19.200
3.	PT. Wanamukti Wisesa	SK.1238/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021	Tebo	9.105
4.	PT. Lestari Asri Jaya	SK.1170/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Tebo	61.495
5.	PT. Wanakasita Nusantara	SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021	Batanghari, Sarolangun	9.030

NO	NAMA PBPH	NOMOR SK	LOKASI	LUAS (HA)
6.	PT. Samhutani	SK. 751/Menhut-II/2014	Sarolangun	30.312
7.	PT. Wana Perintis	SK.1120/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Sarolangun	7.104
8.	PT. Jebus Maju	SK.1115/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin	15.012
9.	PT. Agronusa Alam Sejahtera	SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022	Batanghari, Sarolangun	23.729
10.	PT. Alam Lestari Nusantara	SK.1237/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Sarolangun	10.785
11.	PT. Limbah Kayu Utama	SK.1116/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Tebo	19.300
12.	PT. Mugitriman International	SK.1118/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Bungo	37.500
13.	PT. Malaka Agro Perkasa	SK.1117/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Bungo	24.485
14.	PT. Hijau Artha Nusa	SK.1114/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin, Sarolangun	32.620
15.	PT. Gading Karya Makmur	SK.1113/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Sarolangun	27.703
16.	PT. Delonix Lestari Raya	SK.1112/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Merangin	5.050
17.	PT. Rimba Tanaman Industri	SK.1140/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari	7.290
18.	PT. Rimba Hutani Mas	SK.1500/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021	Batanghari, Tanjung Jabung Barat	35.814
	Jumlah Luas (Ha) PBPH-HT			662.700
	Jumlah Luas (Ha) (A+B+C)			805.162

Setiap hasil hutan dilakukan Pengukuran dan Pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah, dan penetapan jenis oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sebagai dasar pengenaan PNBP atas pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan. Merujuk data tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) tahun 2022,

maka jumlah GANISPH Non ASN yang ada di wilayah Provinsi Jambi terdapat sebanyak 383 kualifikasi yang terdiri dari 9 (sembilan) kualifikasi yaitu Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanenan Hasil Hutan, Penguji Kayu Bulat, Penguji Kayu Gergajian, Penguji Kayu Lapis, Penguji Kelompok Batang, Penguji Kelompok Getah serta Pengukuran dan Pemetaan. Jumlah GANISPH Non ASN per kualifikasi di Provinsi Jambi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. GANISPH (Non ASN) di Provinsi Jambi

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)
1.	Perencanaan Hutan (CANHUT)	41
2.	Pembinaan Hutan (BINHUT)	30
3.	Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT)	16
4.	Pengukuran dan Pemetaan (Kurpet)	10
5.	Penguji Kayu Bulat (PKB)	213
6.	Penguji Kayu Gergajian (PKG)	41
7.	Penguji Kayu Lapis (PKL)	24
8.	Penguji Kelompok Batang (JIPOKTANG)	3
9.	Penguji Kelompok Getah (JIPOKTAH)	5
Jumlah		383

Untuk Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) ASN yang terdaftar pada Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT) di Provinsi Jambi terdapat 86 orang dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. GANISPH (ASN) di Provinsi Jambi

No	Kualifikasi	Jumlah (orang)
1.	Perencanaan Hutan (CANHUT)	15
2.	Pembinaan Hutan (BINHUT)	9
3.	Pemanenan Hutan (NENHUT)	1
4.	Pengujian Kayu Bulat (PKB)	41
5.	Pengujian Kayu Gergajian (PKG)	9
6.	Pengujian Kayu Lapis (PKL)	3
7.	Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG)	3
8.	Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH)	4
9.	Pengukuran dan Pemetaan (Kurpet)	-
Jumlah		86

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2021 merupakan perwujudan dari kewajiban BPHL Wilayah IV Jambi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Akuntabilitas kinerja Tahun 2021 disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 yang dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2021 didasari pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan didukung dengan DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2021. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdapat 5 (lima) sasaran kinerja dengan target yang telah ditentukan. Dari 5 sasaran kinerja tersebut, 4 sasaran dapat terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan (persentase capaian lebih dari 100%), dan 1 sasaran tercapai sebesar 92 % dengan rincian sebagaimana tabel. 10.

Tabel.10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
1	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	57.500 Ha	177.155 Ha	120%
2	Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	5.145.000 m3	5.351.380 m3	104%
3	Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan	12 orang	51 orang	120%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
4	Meningkatnya Produk HHBK dan Investasi Jasa Lingkungan	Produksi komoditas HHBK meningkat	8.450 ton	10.891 ton	120%
5	Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	3.745.821 m3	3.445.173 m3	92%

Secara umum capaian kinerja tiap sasaran kegiatan BPHL Wilayah IV Jambi tahun 2021 dapat melebihi target indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 maupun target volume Rincian Output yang telah ditetapkan pada DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2021 dengan rincian per sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya perencanaan pengelolaan hutan produksi

Sasaran kinerja ini diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran DIPA pada kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi (5397) yang dijabarkan pelaksanaannya pada Rincian Output HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project; Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan dan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Kategori Maju. Capaian kinerja dihitung berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA dibandingkan dengan target volume RO yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Output HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project, capaian kinerja 100% dari target 1 lembaga;
- Rincian Output Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan dengan target 2 lembaga, dapat terealisasi melalui pelaksanaan kegiatan engawasan dan Pengendalian RPHJP/RPHJPd KPH terealisasi pada 16 Unit KPHP (KPHP Unit I s/d 16) dengan luas 1,356,964 Ha, dan kegiatan dentifikasi dan Verifikasi/Updating Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan di KPH 8 unit KPHP (Unit VI, VII, VIII, IX,

X, XV, XIV, XI, XIII) dengan luas 901.611 Ha. Total realisasi 2.258.575 Ha atau sebesar 120% dari target sebesar 2 lembaga;

- Rincian Output Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Kategori Maju dengan target volume 1 lembaga, terealisasi 100%, capaian kinerja terlaksana pada 1 lembaga berupa fasilitasi Pembangunan Ekonomi Produktif masyarakat berupa pembangunan Agroforestry seluas 10 Ha bagi anggota KTH Sribado Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun pada KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
- Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan indikator kinerja luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target seluas 57.500 Ha. Realisasi kegiatan berupa identifikasi dan verifikasi / updating peta arahan pemanfaatan hutan produksi terhadap areal yang telah ditetapkan pada Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Tahun 2021 untuk Provinsi Jambi seluas 177.155 Ha pada 8 unit KPHP (Unit VI, VII, VIII, IX, X, XV, XIV, XI, XIII) sehingga capaian kinerja dapat dinilai sebesar 120 %.

2. Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman.

Sasaran kinerja ini diimplementasikan pada pelaksanaan anggaran pada kegiatan peningkatan usaha hutan produksi (5398) yang pelaksanaannya dirinci pada Rincian Output Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan dengan target volume 2 lembaga. Capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebanyak 17 lembaga (terealisasi 120 %) terdiri dari realisasi sub komponen:

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan Lestari (Agroforestry, SIPUHH/SIPNBP dan Pemetaan Partisipatif pada 4 unit KPHP.
- Monitoring Realisasi Produksi dan Luas Penanaman pada 11 Unit Manajemen;
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Karhutla KPHP bagi 2 Unit KPHP.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan indikator kegiatan produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebanyak 5.145.000 m³. Hingga akhir desember 2021 produksi hasil hutan kayu di Provinsi Jambi mencapai 5.350.380 m³ atau sebesar

108% dari target. Produksi kayu bulat 97,36% berasal dari IUPHHK HTI untuk pemenuhan bahan baku industri pulp dan kertas, 2,37% produksi berasal dari perorangan (pemanfaatan kayu tumbuh alami pada lahan hak) dan produksi land clearing IUPHHK HTI sebesar 0,27%.

3. Meningkatkan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Luran Kehutanan

Sasaran kinerja ini diimplementasikan pada pelaksanaan anggaran kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Luran Kehutanan (5399) yang pelaksanaannya dirinci pada Rincian Output :

- Fasilitasi dan Pembinaan Tertib luran dengan target volume 6 lembaga terealisasi pada 13 Unit Manajemen (120%).
- Peredaran hasil Hutan dan luran Kehutanan yang diawasi dan dikendalikan dengan target volume 1 lembaga yang pelaksanaannya terealisasi pada 7 Unit KPHP (120%). Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi dalam bentuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan (GANIS PH) lingkup Provinsi Jambi yang sudah terdaftar pada aplikasi SIGANISHUT sebanyak 383 orang. Dari hasil pelaksanaan penilaian kinerja tersebut 366 orang dinyatakan dalam kriteria layak dan 17 orang dinyatakan dalam kriteria tidak layak karena ketidakhadiran dalam pelaksanaan penilaian kinerja.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan indikator kinerja tenaga kerja profesional di bidang pemanfaatan hutan dengan target sebanyak 12 Orang. Pada tahun 2021, BPHP bekerja sama dengan Balai Diklat Kehutanan Pekan Baru dan APHI Komda Jambi telah mengadakan pelatihan Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat dengan jumlah peserta 40 orang dan telah mengikutsertakan pelatihan bagi 11 tenaga teknis dengan berbagai kualifikasi yang diselenggarakan oleh balai lain. Dengan penyelenggaraan dan penyertaan peserta pelatihan tenaga kerja profesional bertambah sejumlah 51 orang sehingga capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 120%. Bertambahnya tenaga profesional tersebut merupakan dampak dari semakin meningkatnya jumlah perizinan Perhutanan Sosial yang ada serta fasilitasi PUHH untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.

4. Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan

Sasaran kinerja ini diimplementasikan pada pelaksanaan anggaran kegiatan peningkatan usaha jasa lingkungan hutan dan hasil hutan bukan kayu (5400) yang pelaksanaannya dirinci pada Rincian Output:

- Pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan dengan target volume 6 lembaga terlaksana pada 6 lembaga (KPHP) dan 2 Unit IPHHBK (teralisasi 120%).
- Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha jasling dan HHBK dengan target volume 6 lembaga terlaksana pada 8 KPHP (teralisasi 120%).

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan indikator produksi komoditas HHBK meningkat dengan target sebesar 8.450 ton. Pada tahun 2021, produksi HHBK baik yang dihasilkan baik oleh PBPH, pemegang izin Perhutanan Sosial maupun masyarakat terpantau sebesar 10.891 ton atau sebesar 120%, yang berasal dari produksi Getah Karet 8.130 ton (74,65%), tandan buah sawit (tbs) 2.622 ton (24,07%) dan berbagai jenis rotan 139 ton (1,28%). Potensi produksi Getah karet dan tbs akan semakin meningkat pada waktu yang akan datang dengan adanya penambahan luas tanaman IUPHHK HTI Tanaman Karet dan semakin bertambahnya perizinan Perhutanan Sosial yang memiliki keterlanjuran tanaman kelapa sawit.

5. Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan

Sasaran kinerja ini diimplementasikan pada pelaksanaan anggaran kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan (5401) yang pelaksanaannya dirinci pada Rincian Output industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya dengan target volume 9 lembaga. Kegiatan ini realisasikan dalam bentuk kegiatan:

- Pemantauan kinerja usaha IUPHHK terealisasi pada 15 unit PBPHH
- Pemantauan harga pasar terlaksana pada 11 PBPHH;
- Bedah kinerja IUPHHK yang dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan;
- Pembekalan teknis produksi dan pengolahan produk HHBK bagi masyarakat terlaksana pada 2 KPHP.

Secara keseluruhan capaian kinerja sebesar 120%.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, sasaran kinerja ini dinilai berdasarkan indikator volume produksi kayu olahan yang bersertifikasi legalitas kayu dengan target 3.745.821 m3. Pada tahun 2021, produksi kayu olahan bersertifikat legalitas kayu berdasarkan pantauan mencapai 3.445.173 m3 atau sebesar 92%. Produksi olahan kayu tersebut 94,98% berupa bahan baku serpih, 2,88% kayu lapis dan LVL, 1,21% veneer serta 0,93% Kayu gergajian. Tidak tercapainya target kinerja produksi kayu olahan pada tahun 2021 sebagai akibat berkurangnya pasokan sumber bahan baku industri pengolahan kayu (Kayu lapis, LVL, Veneer dan Kayu gergajian) dampak dari pembatasan aktifitas masyarakat pada masa PPKM serta terhentinya produksi kayu bulat yang berasal dari 2 unit IUPHHK HA yang ada di provinsi Jambi.

Pelaksanaan kegiatan BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022 didasari pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya didukung dengan DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2022. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan perwujudan komitmen balai untuk mencapai target kinerja yang dituangkan dalam target Rincian Output (RO) yang didukung dengan ketersediaan pendanaan DIPA balai. Sedangkan perjanjian kinerja pada tahun 2021 perjanjian kinerja dituangkan pada komitmen balai untuk mencapai indikator kinerja balai sebagai perwujudan dari sasaran kegiatan. Perbedaan format perjanjian kinerja tersebut mengakibatkan capaian kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2021.

Beberapa hal yang dapat diperbandingkan adalah antara indikator kinerja balai tahun 2021 dan realisasi rencana aksi dari perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana tabel. 11.

Tabel.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
1	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
3	Layanan Sarana Internal	5 Unit	5 Unit	100%
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
4	HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
5	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
6	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100%
8	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	100%
9	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100%
10	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	7 Badan Usaha	7 Badan Usaha	100%
11	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	100%
12	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100%
13	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	1 UMKM	1 UMKM	100%
14	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	8 Badan Usaha	8 Badan Usaha	100%

Capaian kinerja seluruh kegiatan yang merupakan target Rincian Output (RO) BPHL Wilayah IV Jambi tahun 2022 seluruhnya dapat terealisasi 100% sebagaimana rencana yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Layanan Umum

Rincian Output layanan umum yang merupakan bentuk pelaksanaan dukungan manajemen satker BPHL Wilayah IV Jambi dengan target kinerja 1 layanan dapat teralisasi 100 % melalui pelaksanaan kegiatan berupa:

- a) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran
- b) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
- c) Pengelolaan kepegawaian

d) Fasilitas penanganan pandemi Covid 19

2. Layanan Perkantoran

Rincian Output layanan perkantoran yang merupakan bentuk pelaksanaan pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan perkantoran BPHL Wilayah IV Jambi dengan target kinerja 1 layanan dapat teralisasi 100 % melalui pelaksanaan kegiatan berupa:

- a) Pembayaran gaji dan tunjangan
- b) Operasional perkantoran selama 12 bulan serta pemeliharaan kantor

3. Layanan Sarana Internal

Rincian Output layanan perkantoran yang merupakan bentuk pelaksanaan pengadaan perangkat pengeolah data dan komunikasi BPHL Wilayah IV Jambi dengan target kinerja 5 unit dapat teralisasi seluruhnya sebanyak 5 unit perangkat pengeolah data dan komunikasi (100 %) berupa Sacnner 1 unit, GPS 2 unit dan UPS 2 unit.

4. HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project

Rincian Output HLN Forest Investment Program (FIP) II dengan target 1 kegiatan terlaksana seluruhnya (100%). Kegiatan HLN tersebut terlaksana pada KPHP Unit VII hulu Sarolangun melalui pelaksanaan:

- a) Konsultasi dan oordinasi kegiatan FIP II
- b) Penyusunan dokumen dan peta rencana pengelolaan RPHJPd Tahun 2023
- c) Dukungan operasional kendaraan KPH
- d) Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Exit Strategy dan Laporan Akhir Proyek FIP-II
- e) Pengembangan DataBase dan Sistem Informasi Operasional Knowledge Resource Centre
- f) Inhouse Training Pengelolaan Website
- g) Workshop Perhitungan Karbon

Seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan disukung dengan adanya sinergitas yang baik antara BPHL Wilayah IV Jambi dan KPHP Unit VII Hulu Sarolangun sebagai lokus

pelaksanaan kegiatan FIP II. Program kegiatan serupa (program hibah) masih dirasa sangat diperlukan bagi KPHP dan KPHL Lingkup Provinsi Jambi dalam rangka mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak. Exit Strategy yang diluncurkan diharapkan dapat memberikan kesinambungan pelaksanaan program di masa mendatang.

5. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang Diawasi dan dikendalikan

Target kinerja pada RO Perencanaan pengelolaan hutan yang diawasi dan dikendalikan adalah 1 lembaga dan pada tahun 2022 teralisasi 100% yaitu teralisasinya perencanaan pengelolaan hutan pada 1 wilayah kerja BPHL Wilayah IV Jambi. Bentuk pelaksanaan kegiatan berupa FGD pembinaan dan evaluasi perencanaan (RPHJP/RPHJPD KPH) yang terealisasi berupa bimbingan dan evaluasi penyusunan RPHJP pada 13 unit KPHP dan 1 unit KPHL, serta fasilitasi penyusunan RPHJP pada 3 unit KPHP di Provinsi Jambi. Bentuk kegiatan lainnya berupa FGD Updating Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Lingkup Provinsi Jambi yang diikuti oleh seluruh KPH Lingkup Provinsi Jambi dan pelaksanaan verifikasi peta arahan pemanfaatan hutan tahun 2021 yang dilaksanakan pada kawasan hutan produksi di wilayah kerja KPHP Unit XI dan XII Batanghari. Kegiatan dapat teralisasi sebagaimana target yang ditetapkan dengan adanya koordinasi dan sinergitas kegiatan dengan para pihak terutama Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH lingkup Provinsi Jambi serta didukung dengan adanya digitisasi perencanaan pengelolaan hutan melalui SIRPHJP dan SICAKAP. Kegiatan diharapkan dapat direalisasikan setiap tahun sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan di Provinsi Jambi.

6. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Target RO Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari pada tahun 2022 adalah 1 lembaga dan dapat teralisasi 100% pada 1 lembaga KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun. Realisasi kegiatan berupa Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemeliharaan tanaman agroforestry tahun ke-1. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menghasilkan bibit yang berasal dari

pembiakan vegetatif untuk dapat menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengelolaan areal gambut sehingga dapat menunjang keberhasilan dan produktifitas tanaman yang diusahakan masyarakat. Pemeliharaan tanaman agroforestry merupakan kegiatan lanjutan dari pelaksanaan pembangunan agroforestry yang terlaksana pada tahun 2021 dengan tujuan untuk dapat meningkatkan keberhasilan dan produktifitas areal agroforestri seluas 10 Ha pada KTH Sribado Kecamatan Mandiangin. Kegiatan pemeliharaan terdiri dari kegiatan pengadaan bahan pemeliharaan tanaman (insektisida, herbisida dan pupuk), upah pemeliharaan tanaman, pengadaan bibit tanaman sela dan tanaman pagar serta pengadaan dan pemasangan instalasi air. Diharapkan kedepannya Agroforestri pada KTH Sribado yang telah terbangun dapat menjadi areal contoh pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi serta tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.

7. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Target kinerja pada RO kegiatan usaha pemanfaatan yang diawasi dan dikendalikan adalah 1 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Realisasi RO melalui kegiatan Pengawasan dan pengendalian implementasi proses penyesuaian perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL dan Updating data Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Melalui kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dari pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan pada 22 unit PBPH yang terdapat di Wilayah kerja BPHL Wilayah IV Jambi dapat terawasi dan dikendalikan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan komitmen kinerja berupa pemenuhan target rencana aksi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 31.814 Ha, dapat terealisasi seluas 43.702 Ha setara 137 % serta produksi hasil hutan kayu dengan target 5.351.404 m³, terealisasi sebesar 5.526.425 M³ didominasi oleh hasil hutan kayu yang berasal dari PBPH HT sebesar 98,11%. Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung sinergitas para pihak dalam pengelolaan hutan lingkup

provinsi jambi, keberadaan pelayanan digital dalam pengelolaan hutan diantaranya melalui SICAKAP, SIGANISHUT dan SIPUHH.

8. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Target kinerja pada RO fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan adalah 1 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Realisasi RO melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi multiusaha kehutanan yang diikuti oleh 22 unit PBPH Lingkup Provinsi Jambi dan Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan multi usaha kehutanan / perlindungan hutan / kemiteraan kehutanan pada PBPH yang juga terealisasi pada 22 unit PBPH Lingkup Provinsi Jambi. Melalui kegiatan yang telah direalisasikan oleh BPHL Wilayah IV Jambi tersebut dapat memfasilitasi unit PBPH yang terdapat di Provinsi Jambi untuk mengembangkan multiusaha kehutanan, sehingga dapat memberikan peningkatan produktifitas dalam pengelolaan hutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian kawasan hutan.

9. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Target kinerja pada RO kinerja multiusaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan adalah 2 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Realisasi RO melalui kegiatan Monitoring Luas Penanaman pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Monitoring Produksi Hasil Hutan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Monitoring dan evaluasi penerapan multi usaha kehutanan pada PBPH, Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Identifikasi Areal Rawan Karhutla pada KPH/PBPH, Identifikasi Areal Open Access dan Izin Perhutanan Sosial di KPH, Identifikasi Penggunaan Kawasan yang Tidak Sesuai dan Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan dan Evalasi Pengelolaan Hutan Lestari. Melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, seluruh aktifitas pengelolaan hutan pada 22 unit PBPH di Provinsi Jambi dapat diawasi dan dikendalikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terealisasinya target kinerja pada RO ini selaras dengan pencapaian komitmen kinerja tahun 2022 yaitu produksi komoditas HHBK sebesar 9.042 Ton dapat teralisasi sebesar 9.600 Ton atau sebesar 106 %. Realisasi produksi

HHBK tersebut didominasi berupa kelompok getah kayu hutan (81%), buah-buahan dan umbi-umbian (17%) dan kelompok Rotan (2%).

10. Fasilitas dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan

Target kinerja pada RO fasilitas dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan adalah 7 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Realisasi RO melalui kegiatan Pembinaan kinerja tenaga teknis dan optimalisasi PNBP. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh aktifitas pemenuhan kewajiban PNBP dan tertib peredaran hasil hutan pada 22 unit PBPH di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak terhadap PNBP dari sektor kehutanan serta mengurangi deforestasi dan Illegal logging.

11. Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Target kinerja pada RO fasilitas dan pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan adalah 11 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Realisasi RO melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan dan Bimtek Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh aktifitas pemenuhan kewajiban PNBP dan tertib peredaran hasil hutan pada 22 unit PBPH di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak terhadap PNBP dari sektor kehutanan serta mengurangi deforestasi dan Illegal logging . Terealisasinya target kinerja pada RO ini merupakan perwujudan dari realisasi komitmen kinerja dalam rencana aksi yaitu PNBP dari Pemanfaatan hutan sebesar Rp. 90.924.111.180 terealisasi sebesar Rp. 55.146.319.473 atau setara 60,7 %. Realisasi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran PSDH, DPEH dan Iuran Kehutanan sebesar Rp. 4.670.142.719 dan DR sebesar USD. 564.815. Total penerimaan PNBP tersebut didominasi dari Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan tanaman yaitusebesar 93%. Sejak tahun 2020, Penerimaan PNBP mengalami penurunan sebesar 10,70%.

12. Fasilitas dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah

Target kinerja pada RO Fasilitas dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah adalah 8 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%. Terealisasinya target kinerja pada RO ini merupakan perwujudan dari realisasi komitmen kinerja dalam rencana aksi yaitu volume produksi hasil hutan kayu olahan bersertifikat LK sebesar 3.746.196 m³ terealisasi sebesar 3.609.457 M³, yang didominasi oleh jenis produk serpih kayu sebesar 94,18%.

13. Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan

Target kinerja pada RO Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan adalah 1 UMKM dan pada tahun 2022 teralisasi 100%.

14. Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya

Target kinerja pada RO Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya adalah 8 Badan Usaha dan pada tahun 2022 teralisasi 100%.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

BPHL Wilayah IV Jambi dalam mencapai kinerjanya didukung pendanaan melalui dana DIPA BPHL Wilayah IV Jambi dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,26 % dengan rincian sebagai mana Tabel. 12 :

Tabel.12 Rincian Realisasi anggaran tahun 2021

No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<i>HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1.450.000.000	1.447.601.780	99,83
2.	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	370.300.000	370.178.000	99,97
3.	Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Kategori Maju	1.712.240.000	1.712.240.000	100,00
4.	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	943.857.000	941.675.895	99,77
5.	Fasilitas dan Pembinaan Tertib Iuran dan Peredaran hasil Hutan	118.037.000	117.589.000	99,62
6.	Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan yang diawasi dan dikendalikan	83.400.000	82.856.400	99,35
7.	Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan	213.218.000	211.992.610	99,43
8.	Fasilitas dan Pembinaan	200.906.000	200.906.000	100,00

No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK			
9.	Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	450.000.000	449.647.978	99,92
10.	Layanan Perkantoran	5.683.282.000	5.497.488.614	96,73
11.	Layanan Umum	250.000.000	247.912.480	99,16
12.	Layanan Sarana Internal	28.376.000	27.726.000	97,71
Total		11.503.616.000	11.304.003.566	98,26

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 11.304.003.566,- (98,26%)

merupakan realisasi pada 12 Rincian Output (RO) kegiatan yang terdiri dari 9 RO kegiatan teknis balai dan 3 RO kegiatan umum perkantoran. Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan RO kegiatan teknis hampir mencapai 100%, hal tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan teknis yang memadai, SDM balai yang memadai, koordinasi dengan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan yang baik, diantaranya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP Lingkup Provinsi Jambi, serta Pemerintah Daerah dan unit manajemen yang ada di Provinsi Jambi. Pada kegiatan umum perkantoran rata-rata realisasi anggaran sebesar 97,87% dikarenakan adanya anggaran yang tidak terealisasi diantaranya adalah gaji dan tunjangan pegawai, serta biaya layanan sarana internal kantor.

BPHL Wilayah IV Jambi dalam mencapai kinerjanya didukung pendanaan melalui dana DIPA BPHL Wilayah IV Jambi dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,87 % dengan rincian sebagai mana Tabel. 13 :

Tabel.13 Rincian Realisasi anggaran tahun 2022

No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<i>HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	885.750.000	855,661,350	99,99
2.	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	370,299,000	370,167,603	99,96
3.	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	359,250,000	358,875,500	99,90
4.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	435,770,000	434,747,178	99,77

No	Nama Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	449,929,000	449,729,891	99,96
6.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	801,417,000	797,728,370	99,54
7.	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Peredaran hasil Hutan	169,348,000	169,060,219	99,83
8.	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	223,214,000	220,716,590	98,88
9.	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	163,660,000	162,125,718	99,06
10.	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	253,600,000	253,222,959	99,85
11.	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	329,095,000	328,283,566	99,75
12.	Layanan Umum	162.500.000	162.154.200	99,79
13.	Layanan Perkantoran	6.115.467.000	5.898.149.008	96,45
14.	Layanan Sarana Internal	29.614.000	29.614.000	100,00
Total		10,718,913,000	10,490,235,720	97,87

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10,490,235,720,- (97,87%)

merupakan realisasi pada 14 Rincian Output (RO) kegiatan yang terdiri dari 11 RO kegiatan teknis balai dan 3 RO kegiatan umum perkantoran. Rata-rata realisasi anggaran pada pelaksanaan RO kegiatan teknis sebesar 99,08 % hal tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan teknis yang memadai, SDM balai yang memadai, koordinasi dengan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan yang baik, diantaranya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP Lingkup Provinsi Jambi, serta Pemerintah Daerah dan unit manajemen yang ada di Provinsi Jambi. Pada kegiatan umum perkantoran rata-rata realisasi anggaran sebesar 96,54% dikarenakan adanya anggaran yang tidak terealisasi diantaranya adalah gaji dan tunjangan pegawai.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KLHK DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Direktorat jenderal Pengelolaan huta Lestari pada Tahun 2023 diamanatkan untuk dapat mendukung salah satu Prioritas nasional Pembangunan Tahun 2023 yaitu dalam rangka memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Strategi Ditjen PHL dalam rangka pencapaian target Prioritas nasional tersebut terdiri dari :

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dengan indikator: (1) Produksi hasil hutan bukan kayu; (2) KPH yang masuk kategori maju; (3) Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi (PP6), dengan indikator: (1) produksi hasil hutan kayu; (2) Jumlah produk kayu olahan bersertifikat legalitas kayu; (3) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu; (4) Pengembangan industri primer kehutanan berbasis non kayu.

Guna mendukung pencapaian PN 1 ini, lingkup Ditjen PHL merencanakan pelaksanaannya dalam 11 Rencana Output (RO) dan sesuai kebijakan RSPP maka diturunkan pelaksanaannya di Tingkat BPHL sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) lingkup Ditjen PHL. RO pelaksanaan target Prioritas Nasional pada wilayah kerja BPHL Wilayah IV Jambi terdiri dari :

1. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan target 1 Lembaga;
2. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan dengan target 4 Lembaga;
3. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL dengan tergetb 1 lembaga;

Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dandikendalikan kinerjanya.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN

KEGIATAN TAHUN 2023

Kegiatan yang direncanakan BPHL Wilayah IV Jambi adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan pencapaian IKK 5 (lima) Direktorat dan 1 (satu) Setditjen pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, terdiri dari :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan (6729).
2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan (6730).
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731).
4. Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan (6732).
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan (6733).
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (5396).

Dalam hal dapat menuntaskan kegiatan diperlukannya sasaran kegiatan yang ingin dijadikan target pada tahun anggaran 2023. Dalam hal keberhasilan kegiatan dicapai akan memperoleh *output* dari suatu sasaran kegiatan, unit

kegiatan dan elemen kegiatan tahun 2023 demi meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHL. Implementasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL. Sasaran kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak (6729), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terdiri dari :
 - a. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan. Elemen pelaksanaan kegiatan berupa pelaksanaan RO: Rencana Pengelolaan Hutan yang efektif dengan target 1 (satu) lembaga yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan :
 - Pembinaan dan Evaluasi Perencanaan (RPHJP/RPHJPd KPH).
 - Identifikasi dan Verifikasi Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan.
 - FGD Perencanaan Pengelolaan Hutan pada KPHP dan KPHL lingkup Provinsi Jambi.
 - b. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. Elemen pelaksanaan kegiatan berupa pelaksanaan RO Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan target 1 (satu) lembaga dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan :
 - Pembangunan Ekonomi Produktif Masyarakat pada KPH (Agroforestry 1 lokasi).
 - Fasilitasi Penilaian KPH Efektif.
 - Fasilitasi Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju.

2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan (6730), Indikator Kinerja Kegiatannya yaitu Nilai Investasi permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan multiusaha kehutanan dengan target 2 (dua) Badan Usaha dilaksanakan melalui RO kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan Updating data Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
3. Sasaran kegiatan Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (6731), Indikator Kinerja Kegiatannya terdiri dari :
 - a. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan dilaksanakan dengan target 3 (tiga) badan usaha melalui RO Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dalam bentuk pelaksanaan :
 - Bimtek Implementasi Multi Usaha Kehutanan;
 - Bimtek implementasi multiusaha kehutanan dan kemitraan kehutanan pada PBPH
 - Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan multi usaha kehutanan / perlindungan hutan / kemitraan kehutanan pada PBPH
 - Fasilitasi Multiusaha Kehutanan.
 - b. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu dilaksanakan melalui RO Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan target 4 (empat) badan usaha dalam bentuk pelaksanaan :
 - Monitoring Luas Penanaman pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

- Monitoring Produksi Hasil Hutan pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
 - Monitoring dan evaluasi penerapan multi usaha kehutanan pada PBPH.
 - Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
 - Identifikasi Areal Rawan Karhutla pada KPH/PBPH.
 - Identifikasi Areal Open Access.
 - Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan dan Evaluasi Hutan Lestari.
4. Sasaran Kegiatan Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (6731), Indikator Kinerja Kegiatanannya yaitu Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat dilaksanakan melalui RO Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis kelompok Tani Hutan dengan target 2 (dua) Kelompok Masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan:
- Fasilitasi pembangunan usaha kelompok masyarakat;
 - Pembinaan teknis pengembangan usaha pemanfaatan hutan.
5. Sasaran kegiatan Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (6732), Indikator Kinerja Kegiatanannya yaitu:
- a. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT, diwujudkan melalui pelaksanaan RO Pemantauan dan Evaluasi Bidang Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan target 7 (tujuh) badan usaha yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan pembinaan kinerja tenaga teknis dan optimalisasi PNPB.

- b. Wajib bayar yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan diwujudkan melalui pelaksanaan RO Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan dengan target 11 (sebelas) badan usaha yang dijabarkan dalam bentuk :
- Pemantauan dan Evaluasi kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan
 - Bimtek Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
6. Sasaran Kegiatan Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan (6733.01), Indikator Kinerja Kegiatanannya yaitu Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK diwujudkan melalui pelaksanaan RO Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan dengan target 8 (delapan) badan usaha yang dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan :
- Bimbingan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) bagi UMKM.
 - Bimbingan Teknis Sertifikasi Produksi UMKM.
 - FGD perizinan bagi UMKM Kehutanan Provinsi Jambi.
- Juga diwujudkan dalam pelaksanaan RO Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya dengan target 9 (sembilan) badan usaha dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan :
- Bedah Kinerja Perizinan berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bersertifikat.
 - Pemantauan perkembangan Harga Pasar Hasil Hutan Kayu lingkup Provinsi Jambi.
7. Sasaran Kegiatan Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK (6733.02), Indikator Kinerja Kegiatanannya berupa UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan

RO UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilaian SVLK dengan target 1 (satu) UMKM dijabarkan dalam pelaksanaan :

- Inventarisasi dan Verifikasi UMKM.
- Sertifikasi/Penilaian SVLK UMKM.
- Sosialisasi Peraturan/Bintek SVLK.

8. Sasaran Kegiatan Meningkatkan kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. (5396) Indikator Kinerja Kegiatanannya yaitu :

- a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan target 82 poin.
- b. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Level Maturitas SPIP Ditjen PHL, Level 4.
- c. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel 1 laporan.
- d. Upaya pencapaian IKK tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan RO BPHL IV Jambi berupa Layanan Umum dengan target 1 layanan dan Layanan Perkantoran dengan target 1 layanan.

Hingga Desember 2023, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2023 sebagaimana penjelasan berikut :

1. BAGIAN TATA USAHA

1. Layanan Umum (5396 EBA)

Target kinerja RO Layanan Umum adalah terlaksananya layanan umum BPHL Wilayah IV Jambi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai sejumlah 1 layanan. RO Layanan umum merupakan RO yang selalu tersedia pada kegiatan BPHL tiap tahunnya, dan terealisasi setiap 100 %

setiap tahunnya, sehingga target RO Layanan Umum dapat direalisasikan sesuai dengan Revisi Rencana Strategis BPHL Wilayah IV Jambi Periode Tahun 2019 – 2024, serta sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 konstan terealisasi 100%. Terealisasinya target layanan umum ini menunjang capaian nilai SAKIP sebesar 82,00, meningkatkan Level maturitas SPIP “Memadai” serta Laporan Keuangan yang akuntabel.

Pencapaian target RO Layanan Umum ini direalisasikan melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan rapat koordinasi pembahasan dan penelaahan rencana program kegiatan serta rencana anggaran tahun 2023 baik lingkup internal BPHL Wilayah IV Jambi maupun lingkup unit Eselon 1. Outcome dari kegiatan ini berupa tersusunnya DIPA BPHL Wilayah IV Jambi Tahun 2023 yang berkualitas dan realibel untuk mendukung terlaksananya program Pengelolaan Hutan Lestari dan yang telah disahkan melalui SK DIPA.
2. Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pengelola keuangan dengan mengundang narasumber yang berasal dari KPPN Jambi, pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan serta evaluasi kinerja barang milik negara oleh Tim dari KPKNL Jambi penilaian terhadap BMN berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan Tanah Rumah Negara Golongan I dengan hasil Kinerja **SANGAT BAIK**.

2. Layanan Perkantoran (5396 EBA)

Target kinerja RO Layanan Perkantoran adalah terlaksananya layanan Perkantoran BPHL Wilayah IV Jambi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai sejumlah 1 layanan. RO Layanan Perkantoran merupakan RO rutin pada kegiatan BPHL tiap tahunnya, sehingga target RO Layanan Perkantoran dapat direalisasikan sesuai dengan Revisi Rencana Strategis BPHL Wilayah IV Jambi Periode Tahun 2019 – 2024, serta sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 konstan terealisasi 100%. Pelaksanaan Tugas dan fungsi balai mutlak ditunjang adanya asset dan sumberdaya yang baik sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi salah satunya adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pencapaian target RO Layanan Perkantoran ini direalisasikan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup BPHL Wilayah IV Jambi, dan tunjangan tersebut SDM pada BPHL Wilayah IV Jambi dapat melaksanakan tugas tanggungjawab pekerjaan dengan baik, akuntabel untuk menunjang tugas dan fungsi balai.
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor telah terlaksana selama 1 tahun, yaitu berupa kegiatan pemeliharaan rutin gedung dan sarana prasarana kantor BPHL Wilayah IV Jambi, sehingga diharapkan dapat menunjang aktifitas SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

2. SEKSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

1. (6729.BIC.001) Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif

Dalam rangka meningkatkan perencanaan pengelolaan hutan yang efektif, maka Balai akan melakukan identifikasi dan verifikasi/*updating* Peta Indikatif Arah Pemanfaatan yang berbasis pada Keputusan Menteri LHK tentang peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan tahun 2023, pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPD melalui fasilitasi penyusunan RPHJP KPHP Unit VII, KPHP Unit XI, KPHP Unit XII, KPHP Unit XV dan bimbingan teknis penyusunan RPHJPD terhadap KPHP yang telah memiliki penetapan dokumen RPHJP serta Pembentukan KPHP Kategori Maju melalui kegiatan verifikasi calon KPH efektif yang memenuhi prasyarat penilaian.

2. (6729.QDB.002) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari.

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari meliputi pembangunan agroforestri seluas 10 Ha pada areal kerja KTH di wilayah kerja UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang penentuannya diputuskan setelah melakukan groundcheck terlebih dahulu, pemeliharaan tanaman agroforestry seluas 10 Ha tanaman tahun 2021 di KTH Sribado Wilayah Kerja UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, fasilitasi pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju berupa pemberian honorarium bagi tenaga teknis lapangan sejumlah 5 orang selama 13 bulan, dan fasilitasi perlindungan dan pengamanan hutan pada area yang belum dibebani izin pada 10 Unit KPHP selama 12 bulan.

3. (6730.BIH.001) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan.

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan meliputi Pengumpulan data usaha pemanfaatan hutan, analisa dan desk study, koordinasi / rapat dengan pihak terkait Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan KPHP Lingkup Provinsi Jambi serta instansi terkait lainnya, pelaksanaan perjalanan dinas verifikasi / updating usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, dan FGD updating usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang melibatkan pemegang PBPH lingkup Provinsi Jambi.

4. (6731.BDD.001) Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan.

Peran PBPH sebagai unit pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari pelaku usaha pemanfaatan hutan berhak mendapatkan akses yang sama dalam pemanfaatan hutan. Untuk menciptakan sinergi pemanfaatan hutan antara PBPH dan kelompok masyarakat usaha pemanfaatan hutan perlu diberikan fasilitasi dalam rangka membangun kerja sama. BPHL sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari berperan sebagai fasilitator pengembangan usaha pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. Peningkatan kinerja usaha pemanfaatan dapat didorong dengan kegiatan fasilitasi bagi kelompok masyarakat yang telah melakukan usaha pemanfaatan hutan baik berupa KUPS maupun Kemitraan Kehutanan dengan target 2 (dua) KTH. Untuk mencapai target tersebut, BPHL akan melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan usaha kelompok masyarakat pembinaan teknis pengembangan usaha pemanfaatan hutan.

5. (6731.BDH.002) Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Parameter yang harus dipenuhi dalam pencapaian output Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi PBPH adalah terdapat baseline data PBPH yang berpotensi mengembangkan kegiatan multiusaha kehutanan, telah dilakukan fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan penerapan kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH, telah dilakukan pengecekan kondisi lapangan pada areal PBPH yang akan melakukan kegiatan multiusaha dan terdapat rekomendasi hasil pengecekan lapangan yang menyatakan PBPH tersebut layak untuk melakukan kegiatan multiusaha kehutanan. Targetnya sebanyak 3 (tiga) PBPH yaitu PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Lestari Asri Jaya dan PT. Wira Karya Sakti. Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi PBPH dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Multi Usaha Kehutanan, Bimtek pengelolaan hutan pola kemiteraan masyarakat pada PBPH, dan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan multi usaha kehutanan / perlindungan hutan / kemiteraan kehutanan pada PBPH.

6. (6731.QIH.001) Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan.

Parameter yang harus dipenuhi dalam pencapaian output Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan adalah Penanaman/Produksi Hasil Hutan/Multiusaha Kehutanan (tahun 2020,2021,2022), Penanaman/Produksi Hasil Hutan/Multiusaha Kehutanan pada PBPH tahun 2023, Penanaman/Produksi Hasil Hutan/Multiusaha Kehutanan tahun 2023 lebih tinggi (mengalami kenaikan) daripada realisasi tahun-tahun sebelumnya, Kegiatan perlindungan hutan pada PBPH (tahun 2020,2021,2022),

Kegiatan perlindungan hutan pada PBPH tahun 2023 mengalami kenaikan (kuantitas & kualitas). Target lokasi kegiatan berada pada 3 (tiga) PBPH yang aktif beroperasi di lapangan yaitu PT. Samhutani, PT. Wana Perintis dan PT. Agronusa Alam Sejahtera. Fasilitasi kegiatannya meliputi Monitoring Luas Penanaman pada PBPH, Monitoring Produk Hasil Hutan pada PBPH, Monitoring dan evaluasi penerapan multi usaha kehutanan pada PBPH, Bimbingan teknis Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Identifikasi Areal Rawan karhutla pada KPH/IUPHHK, Identifikasi areal open acces, dan peningkatan kapasitas SDM Perencanaan dan Evalasi Pengelolaan Hutan Lestari dilaksanakan melalui kegiatan penyertaan SDM perencanaan BPHL dalam pelatihan terkait perencanaan kehutanan.

3. SEKSI PEMANTAUAN, EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

1. (6731.QIH.001) Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan.

Pengawasan dan pengendalian Kinerja Multiusaha dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/Produksi Hasil Hutan/Multiusaha Kehutanan serta Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan dengan target capaian adalah 4 (empat) badan usaha. Capaian Pengawasan dan Pengendalian Penanaman / Produksi Hasil Hutan / Multiusaha Kehutanan direncanakan akan diperoleh melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring luas penanaman pada PBPH
- Monitoring Produksi Hasil Hutan pada PBPH

- Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja PBPH
- Monitoring dan Evaluasi Penerapan Multi Usaha Kehutanan pada PBPH

Sedangkan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu :

- Identifikasi Areal Rawan Karhutla pada KPH/PBPH
 - Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Lestari
 - Identifikasi Areal Open Access
2. (6732.BDH.002) Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan.

Parameter yang akan dipenuhi dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang iuran penatausahaan hasil hutan adalah optimalisasi PNBP dan pengawasan tertib pelaksanaan peredaran hasil hutan. Capaian yang diharapkan pada tahun 2023 ini adalah teridentifikasi penyelesaian piutang PNBP serta pengendalian tertib iuran dan peredaran hasil hutan.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian tersebut yakni mengidentifikasi dan memverifikasi Piutang PNBP pada 7 (tujuh) badan usaha (unit manajemen). Ada pun badan usaha tersebut yakni: PT. Wirakarya Sakti, PT. Rimba Hutani Mas, PT. Lestari Asri Jaya, PT. Wanamukti Wisesa, PT. LPPPI, PT. Purnama Indah dan IPHHKKR KUD Merlung.

3. (6732.BIH.001) Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Parameter dalam pencapaian output pengawasan dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan dan penatausahaan

hasil hutan adalah memberikan penguatan pengetahuan terkait peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan terhadap pelaku usaha baik dari PBPH, PPKH, dan perhutanan sosial.

Bentuk kegiatan untuk mendukung capaian output yakni melakukan bimbingan teknis terkait tertib peredaran hasil hutan iuran kehutanan serta melakukan pemantauan dan penilaian kinerja untuk tenaga teknis pengelolaan hutan yang bertugas dan ditempatkan pada simpul penatausahaan hasil hutan.

Target kegiatan bimbingan teknis ini terhadap 11 (sebelas) pelaku usaha yaitu dari PBPH yakni PT. Wirakarya Sakti, PT. Agronusa Alam Sejahtera, PT. Wana Perintis, PT. Wanakasita Nusantara, PT. Rimba Tanaman Industri, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia dan PT. Alam Bukit Tigapuluh. Semendata untuk pelaku usaha yang bergerak pada pinjam pakai kawasan hutan yang menjadi target adalah PT. Petrochina International Jabung dan PT. Anugerah Jambi Coalindo, sementara untuk sector perhutanan sosial yang menjadi target adalah Pemegang perizinan Hutan tanaman Rakyat yakni atas nama Koperasi Produsen Mandiri Maju Bersama dan KTH. Alam Hijau Makmur.

4. (6733.BDH.002) Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan.

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan dilakukan terhadap Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) dengan target capaian adalah 8 (delapan) badan usaha. Capaian kegiatan ini dilakukan dengan cara memfasilitasi dan memberikan pembinaan atau pendampingan terhadap usaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan menengah yakni terhadap PBPHH dengan kapasitas izin di bawah 6000 M3/tahun.

Kegiatan untuk mendukung capaian output yakni melakukan bimbingan teknis terkait rencana kerja operasional Pengolahan hasil Hutan terhadap UMKM yang memuat rencana produksi, rencana pemenuhan bahan baku, rencana penggunaan bahan baku dan rencana pemanfaatan produk hasil olahan. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan pembinaan teknis sertifikasi produk UMKM serta Focus Group Discussion (FGD) bagi UMKM kehutanan di Provinsi Jambi. Ada pun PBPHH selaku badan usaha yang menjadi target yaitu CV. Anja Belawan, Bajuri H Hamim Sawmill, Misran Sawmill, CV. Wira Kayu Abadi, CV. Pauh Rimba, PT. Gema Nusa Lestari, CV. Berkat Tabah Jaya Mandiri dan CV. Rimbun Gede.

5. (6733.QDG.002) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan dilakukan terhadap Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH) dengan skala kecil dan menengah yakni dengan kapasitas di bawah 6000 M3/tahun. Target capaian unit manajemen PBPHH yang difasilitasi yakni sebanyak 1 (satu) badan usaha. Tentu saja untuk menentukan badan usaha yang akan difasilitasi, Balai harus melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi UMKM yang sudah mendapatkan dan menjalankan penilikan sertifikasi VLK dengan baik.

Bentuk kegiatan untuk mendukung capaian output kegiatan ini yakni sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi UMKM
2. Memfasilitasi penilikan VLK pada UMKM terpilih
3. Memberikan peningkatan kapasitas terhadap SDM UMKM baik berupa pendampingan maupun sosialisasi/bintek terkait aturan SVLK

6. (6733.QIH.001) Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya.

Dalam rangka mengawasi dan mengendalikan perizinan pengolahan hasil hutan dilakukan terhadap PBPHH dengan target capaian pada tahun 2023 adalah sebanyak 9 (sembilan) badan usaha dengan kapasitas di atas 6000 M3/tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung capaian output kegiatan penilaian kinerja PBPHH adalah melakukan pemantauan perkembangan harga pasar dan bedah kinerja PBPHH bersertifikat. Bedah Kinerja PBPHH bertujuan untuk membedah permasalahan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh PBPHH.

Untuk badan usaha dengan kapasitas di bawah 6000 M3/tahun yang menjadi lokus pada tahun 2023 adalah PT. Sumindo Daksina Permai, CV. Lubuk Ruso Jaya, CV. Koresh Nature Stone, PT. Jebus Maju, PT. Kumpeh Karya Lestari, CV. Jaya Setia, PT. Jambi Wood Industry, PT. Bulian Jaya Bersama, PT. Gema Nusa Lestari. Sementara untuk PBPHH yang dilakukan kegiatan bedah kinerja adalah industry di atas 6000 M3/tahun yang telah dilakukan pemantauan pada tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh BPHL Wilayah IV Jambi, terdapat kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), didanai secara swadana serta terdapat juga kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok maupun tugas tambahan balai. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang didukung dari APBN berasal dari rupiah murni dan PNBP. Pada tahun 2023, BPHL Wilayah IV Jambi memperoleh anggaran

sebesar Rp. 10.620.478.000,- Rancangan anggaran BPHL Wilayah IV Jambi yang berasal dari APBN dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rencana Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 per Kegiatan

No	Kegiatan	Keuangan		Fisik (%)
		(Rp)	(%)	
1.	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	945.565.000,-	100,00	100,00
2.	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	218.156.000,-	100,00	100,00
3.	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.793.261.000,-	100,00	100,00
4.	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	281.127.000,-	100,00	100,00
5.	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	732.439.000,-	100,00	100,00
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL	6.649.930.000,-	100,00	100,00
Jumlah		10.620.478.000,-	100,00	100,00

BAB IV

PENUTUP

Demikian Penyusunan Revisi Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi Tahun 2023 agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan guna mendukung kegiatan bagi para pegawai pada kantor BPHL Wilayah IV Jambi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai bidang tugasnya dalam kurun waktu 1 tahun (2 Januari 2023 – 31 Desember 2023). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada kesungguhan semua pegawai dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dan bermanfaat bagi pembangunan kehutanan secara umum.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 YANG MEMUAT INDIKATOR KEGIATAN, UNIT KEGIATAN, SASARAN UNIT KEGIATAN, ELEMEN KEGIATAN, TARGET, LOKASI

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
Dukungan Manajemen						
1.	Layanan Umum	Terwujudnya kelembagaan dan operasional perkantoran BPHL Wilayah IV Jambi yang kredibel	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	a) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran b) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan c) Pengelolaan kepegawaian d) Fasilitas penanganan pandemi Covid 19	1 Layanan	-
2.	Layanan Perkantoran	Terwujudnya kelembagaan dan operasional perkantoran BPHL Wilayah IV Jambi yang kredibel	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	a) Pembayaran gaji dan tunjangan b) Operasional perkantoran selama 12 bulan serta pemeliharaan kantor	1 Layanan	-
3.	Layanan Sarana Internal	Terwujudnya kelembagaan dan operasional perkantoran BPHL Wilayah IV Jambi yang kredibel	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	a) 1 Unit Scanner b) 2 Unit GPS c) 2 Unit UPS	5 Unit	-

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
4.	HLN Forest Investment Program (FIP) II: Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	a) Konsultasi dan oordinasi kegiatan FIP II b) Penyusunan dokumen dan peta rencana pengelolaan RPHJPD Tahun 2023 c) Dukungan operasional kendaraan KPH d) Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Exit Strategy dan Laporan Akhir Proyek FIP-II e) Pengembangan DataBase dan Sistem Informasi Operasional Knowledge Resource Centre f) Inhouse Training Pengelolaan Website g) Workshop Perhitungan Karbon	1 Kegiatan	KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
5.	Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	FGD pembinaan dan evaluasi perencanaan (RPHJP/RPHJPD KPH) yang terealisasi berupa bimbingan dan evaluasi penyusunan RPHJP pada 13 unit KPHP dan 1 unit KPHL, serta fasilitasi penyusunan RPHJP pada 3 unit KPHP di Provinsi Jambi	1 Lembaga	KPHP Unit XI dan XII Batanghari
6.	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	Terwujudnya organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri	Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang	Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemeliharaan tanaman agroforestry tahun ke-1. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan	1 Lembaga	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
		dan hutan yang lestari.	lestari.	masyarakat untuk menghasilkan bibit yang berasal dari pembiakan vegetatif untuk dapat menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengelolaan areal gambut sehingga dapat menunjang keberhasilan dan produktifitas tanaman yang diusahakan masyarakat. Diharapkan kedepannya Agroforestri pada KTH Sribado yang telah terbangun dapat menjadi areal contoh pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi serta tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.		
7.	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Peningkatan kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Pengawasan dan pengendalian implementasi proses penyesuaian perizinan berusaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL dan Updating data Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dari pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan pada 22 unit PBPH yang terdapat di Wilayah kerja BPHL Wilayah IV Jambi dapat terawasi dan dikendalikan.	1 Badan Usaha	1. PBPH PT. Wira Karya Sakti, 2. PBPH PT. Rimba Hutani Mas, 3. PBPH PT. Tebo Multi Agro, 4. PBPH PT. Wana Perintis, 5. PBPH PT. Wana Mukti Wisesa, 6. PBPH PT. Lestari Asri Jaya, 7. PBPH PT Alam Lestari Nusantara, 8. PBPH PT. Samhutani, 9. PBPH PT. Jebus Maju, 10. PBPH PT. Agronusa Alam Sejahtera, 11. PBPH PT. Limbah Kayu Utama, 12. PBPH PT. Mugitriman International, 13. PBPH PT. Malaka Agro Perkasa, 14. PBPH PT. Hijau Artha Nusa, 15. PBPH PT. Gading Karya Makmur, 16. PBPH PT. Delonix Lestari Raya,

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
						17. PBPH PT. Rimba Tanaman Industri, 18. PBPH PT. Wanakasita Nusantara, 19. PBPH PT. Putra Duta Indah Wood, 20. PBPH PT. Pesona Belantara, 21. PBPH PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, 22. PBPH PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
8.	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Peningkatan Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	Meningkatnya Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	Kegiatan bimbingan teknis implementasi multiusaha kehutanan yang diikuti oleh 22 unit PBPH Lingkup Provinsi Jambi dan Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan multi usaha kehutanan / perlindungan hutan / kemiteraan kehutanan pada PBPH yang juga terealisasi pada 22 unit PBPH Lingkup Provinsi Jambi.	1 Badan Usaha	23. PBPH PT. Wira Karya Sakti, 24. PBPH PT. Rimba Hutani Mas, 25. PBPH PT. Tebo Multi Agro, 26. PBPH PT. Wana Perintis, 27. PBPH PT. Wana Mukti Wisesa, 28. PBPH PT. Lestari Asri Jaya, 29. PBPH PT. Alam Lestari Nusantara, 30. PBPH PT. Samhutani, 31. PBPH PT. Jebus Maju, 32. PBPH PT. Agronusa Alam Sejahtera, 33. PBPH PT. Limbah Kayu Utama, 34. PBPH PT. Mugitriman International, 35. PBPH PT. Malaka Agro Perkasa, 36. PBPH PT. Hijau Artha Nusa, 37. PBPH PT. Gading Karya Makmur, 38. PBPH PT. Delonix Lestari Raya, 39. PBPH PT. Rimba Tanaman Industri, 40. PBPH PT. Wanakasita Nusantara, 41. PBPH PT. Putra Duta Indah Wood, 42. PBPH PT. Pesona Belantara, 43. PBPH PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PBPH PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
9.	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan.	Kegiatan Monitoring Luas Penanaman pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Monitoring Produksi Hasil Hutan pada Perizinan Berusaha	2 Badan Usaha	44. PBPH PT. Wira Karya Sakti, 45. PBPH PT. Rimba Hutani Mas, 46. PBPH PT. Tebo Multi Agro, 47. PBPH PT. Wana Perintis, 48. PBPH PT. Wana Mukti Wisesa,

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
				Pemanfaatan Hutan, Monitoring dan evaluasi penerapan multi usaha kehutanan pada PBPH, Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan dan Monitoring Kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Identifikasi Areal Rawan Karhutla pada KPH/PBPH, Identifikasi Areal Open Access dan Izin Perhutanan Sosial di KPH, Identifikasi Penggunaan Kawasan yang Tidak Sesuai dan Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Lestari.		49. PBPH PT. Lestari Asri Jaya, 50. PBPH PT Alam Lestari Nusantara, 51. PBPH PT. Samhutani, 52. PBPH PT. Jebus Maju, 53. PBPH PT. Agronusa Alam Sejahtera, 54. PBPH PT. Limbah Kayu Utama, 55. PBPH PT. Mugitriman International, 56. PBPH PT. Malaka Agro Perkasa, 57. PBPH PT. Hijau Artha Nusa, 58. PBPH PT. Gading Karya Makmur, 59. PBPH PT. Delonix Lestari Raya, 60. PBPH PT. Rimba Tanaman Industri, 61. PBPH PT. Wanakasita Nusantara, 62. PBPH PT. Putra Duta Indah Wood, 63. PBPH PT. Pesona Belantara, 64. PBPH PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PBPH PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
10.	Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	Nilai PNBP Fungsional KLHK.	Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	Kegiatan Pembinaan kinerja tenaga teknis dan optimalisasi PNBP. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh aktifitas pemenuhan kewajiban PNBP dan tertib peredaran hasil hutan pada 22 unit PBPH di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak terhadap PNBP dari sektor kehutanan serta mengurangi deforestasi dan Illegal logging.	7 Badan Usaha	65. PBPH PT. Wira Karya Sakti, 66. PBPH PT. Rimba Hutani Mas, 67. PBPH PT. Tebo Multi Agro, 68. PBPH PT. Wana Perintis, 69. PBPH PT. Wana Mukti Wisesa, 70. PBPH PT. Lestari Asri Jaya, 71. PBPH PT Alam Lestari Nusantara.
11.	Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Nilai PNBP Fungsional KLHK.	Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kinerja tenaga teknis, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan dan Bimtek Tertib	11 Badan Usaha	1. PBPH PT. Wira Karya Sakti, 2. PBPH PT. Rimba Hutani Mas, 3. PBPH PT. Tebo Multi Agro, 4. PBPH PT. Wana Perintis, 5. Hutan Hak An. Asful Hayat,

No.	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Kegiatan	Target	Lokasi
				Peredaran Hasil Hutan dan luran Kehutanan. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, seluruh aktifitas pemenuhan kewajiban PNBP dan tertib peredaran hasil hutan pada 22 unit PBPH di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak terhadap PNBP dari sektor kehutanan serta mengurangi deforestasi dan Illegal logging.		6. Hutan Hak An. Kamel, 7. Hutan Hak An. Sadli Yusuf, 8. Hutan Hak An. M.Salam Firdaus, 9. Hutan Hak An. Ardianto, 10. Hutan Hak An. Ramli, 11. Hutan Hak An. Yudi Bachtiar.
12.	Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	Kegiatan identifikasi dan verifikasi UMKM	8 Badan Usaha	1. CV. Anja Belawan, 2. PT. Pijoan Kusuma Raya, 3. CV. Rizki Bersaudara, 4. PT. Pemenang Indah Permai, 5. CV. Basirun Sawmill, 6. PT. Karet Pulai Industri, 7. CV. Bintang Kartika Sawmill, 8. CV. Baijuri Haji Hamim Sawmill.
13.	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	Kegiatan sosialisasi peraturan SVLK, Bimbingan teknis impkementasi SVLK dan Bimbingan UMKM berSVLK	1 UMKM	CV. Sri Untung Sawmil
14.	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	Kegiatan bedah kinerja PBPHH, Pemantauan Kinerja PBPHH, serta pemantauan harga pasar terhadap produk hasil hutan kayu dari PBPHH.	8 Badan Usaha	1. PT. Gema Nusa Lestari, 2. PT. Sabda Kreasi, 3. PT. ATIM, 4. PT. SGS, 5. PT. Karya Kerinci Lestari, 6. PT. JWI, 7. PT. TMAJ 8. PT. LUK Tebo

LAMPIRAN 2. REVISI PERJANJIAN KINERJA BPHL WILAYAH IV JAMBI
TAHUN 2023



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH IV JAMBI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	82 Poin Level 4 1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga 1 Lembaga
3	Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha
4	Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	3 Badan Usaha 4 Badan Usaha
5	Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat
6	Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	7 Badan Usaha 11 Badan Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / RINCIAN OUTPUT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	
		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	8 Badan Usaha
		Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	9 Badan Usaha
8	Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilaian SVLK	
		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	1 UMKM

Anggaran :

Rp. 9.996.378.000

Jakarta, 15 Desember 2023

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Kepala Balai,



Wahyu Nurhidayat, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19700901 200003 1 004